

**STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI  
CIREBON DALAM MENSOSIALISASIKAN PENCEGAHAN PMI NON-  
PROSEDURAL**

*(Communication Strategy Immigration Office Class I Of Border Control Cirebon In  
Socializing Non-Procedural Migrant Workers (PMI) Prevention)*

**Adam Adis Mukrotal**

Politeknik Imigrasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

[mukrotalaa@gmail.com](mailto:mukrotalaa@gmail.com)

**ABSTRACT**

*In the digital era these days, the role of public relations that is referring to communication has a huge influence on the development of all aspects of an organization. One example of its implementation is the Public Relations of the Immigration Office Class I of Border Control Cirebon, which has a role as an intermediary between the community and the office which aims to carry out the socialization plan as a means of disseminating information about government policies, especially in the immigration sector. This paper discusses the concept of work steps and the role of Public Relations of the Immigration Office Class I of Border Control Cirebon in socializing the prevention of Non-Procedural Indonesian Migrant Workers (PMI) and provides an explanation in the form of a study of some of the problems encountered in the socialization process. This paper used descriptive qualitative method which aims to provide an explanation regarding the role of public relations of the Immigration Office Class I of Border Control Cirebon in socializing the prevention of Indonesian Migrant Workers (PMI) and the obstacles they face. Thus, this paper produces 2 (two) main points that have answered the research problem formulation. First, the Public Relations role of the Immigration Office Class I of Border Control Cirebon in socializing the prevention of PMI Non-Procedural has fulfilled 7 (seven) indicators of success in the public relations communication process. Second, several major obstacles have been found that hindered the socialization process, which then urgently need to be addressed immediately by the Public Relations of the Immigration Office Class I of Border Control Cirebon.*

**Keywords:** *Communication, Public Relations, Public, Non-Procedural Indonesian Migrant Workers*

**ABSTRAK**

Dalam era digitalisasi seperti sekarang ini, peran hubungan masyarakat yang berpacu pada komunikasi sangat memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan seluruh aspek pada suatu organisasi. Salah satu contoh implementasinya ialah Humas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon yang memiliki peran sebagai perantara masyarakat dengan kantor yang bertujuan untuk melaksanakan rencana sosialisasi sebagai sarana penyebaran informasi tentang kebijakan pemerintah khususnya di bidang keimigrasian. Laporan Tugas Akhir ini memiliki fokus penelitian yang membahas bagaimana konsep langkah kerja dan strategi komunikasi Humas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon dalam mensosialisasikan pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural serta memberikan penjelasan berupa kajian beberapa permasalahan yang ditemui dalam proses sosialisasinya. Laporan Tugas Akhir ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan suatu hasil penjelasan terkait peran humas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon dalam mensosialisasikan pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) beserta kendala yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian Laporan Tugas Akhir menghasilkan 2 (dua) poin utama yang telah menjawab rumusan masalah penelitian. Pertama, peran Humas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon dalam mensosialisasikan pencegahan PMI Non-Prosedural telah memenuhi 7 (tujuh) indikator keberhasilan dalam proses komunikasi *public relations*. Kedua, telah ditemukannya beberapa kendala utama yang menghambat proses sosialisasi tersebut yang kemudian sangat perlu untuk segera diatasi oleh Humas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.

**Kata kunci: Komunikasi, Hubungan Masyarakat, Publik, Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural**

## PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) per Januari 2020 bahwa total penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan daerah asal menyebutkan bahwa Kabupaten Indramayu dengan jumlah PMI 1.687 orang berada di urutan pertama dan Kabupaten Cirebon dengan jumlah PMI 876 orang berada di urutan ketiga. Kedua Kabupaten tersebut berada di bawah wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon. Melihat dari jumlah PMI yang banyak, maka sangat diperlukan sosialisasi tentang tata cara menjadi PMI yang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pada tahun 2019 ada peningkatan 21 kasus baru dibandingkan dengan tahun 2018. Jumlah 75 kasus pengaduan yang diterima Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) cabang Indramayu selama 2019 sebanyak 52 kasus (69 persen) dialami PMI perempuan, sedangkan 23 kasus (31 persen) dialami oleh PMI laki-laki. Adapun jenis permasalahan yang menjerat PMI itu berupa hilang kontak, tertahan tidak bisa pulang, penempatan secara ilegal, penipuan, dan dituntut untuk membayar ganti rugi atau denda oleh pihak perekrut.

Berdasarkan kasus di atas pada tahun 2019 telah terjadi peningkatan kasus yang terjadi pada PMI dari daerah Indramayu. Dilihat dari permasalahan yang menjerat PMI masih marak permasalahan tentang penempatan secara ilegal.

Sebagai upaya untuk mencegah PMI non-prosedural Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan kebijakan tentang pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non-prosedural yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor.IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI non-prosedural yang ditetapkan 24 Februari 2017.

Maka humas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon harus bisa memaksimalkan penyebaran informasi melalui media sosial. Sosialisasi bisa dilakukan melalui media online yaitu website dan media sosial seperti instagram, youtube, facebook, bisa juga melalui siaran televisi atau radio. Dengan penyebaran informasi melalui media sosial bisa lebih

efektif karena lebih banyak dilihat dan diterima dengan cepat oleh masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu sebuah metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat lampau.

Penulis melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Laporan Tugas Akhir (LTA) terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan September 2020. Hasil penelitian tersebut berupa data yang kemudian penulis sajikan dalam beberapa bentuk sesuai dengan kebutuhan dari penelitian ini. Selanjutnya setelah data disajikan, penulis menganalisis data guna memperoleh hasil yang kemudian disimpulkan dan menjadi sebuah masukan atau rekomendasi khususnya bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon kedepannya.

## PEMBAHASAN

### A. Strategi Komunikasi Humas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon dalam Mensosialisasikan Pencegahan PMI Non-Prosedural

Dalam teori public relations itu sendiri, terdapat 7 (tujuh) indikator yang akan mempengaruhi keberhasilan dalam proses komunikasi. Indikator-indikator tersebut adalah program public relations pada proses komunikasi terdiri dari Credibility (Kredibilitas), Context (Konteks), Content (Isi), Clarity (Kejelasan), Continuity and Consistency (Kontinuitas dan Konsistensi), Channel (Saluran), Capability of the audience (Kapasitas atau kemampuan audiens) (Cutlip, 2006). Data-data yang diperoleh akan dianalisis, dengan menyesuaikan antara keadaan atau fakta di lapangan dengan indikator-indikator tersebut. Dengan demikian akan diperoleh suatu kesimpulan yang akan menjadi rekomendasi mengenai objek kajian, sehingga dapat sesuai dengan indikator dalam teori tersebut.

#### a. Credibility (Kredibilitas)

Unsur pertama yang harus diperhatikan dalam membuat keberhasilan dalam proses komunikasi sebagaimana yang terdapat dalam buku Cutlip (2006) adalah Credibility (Kredibilitas). Dikatakan bahwa dalam memberikan informasi mengenai sosialisasi harus disampaikan oleh

narasumber yang terpercaya. Ini membuat masyarakat sebagai penerima harus mempercayai pengirim informasi dan menghormati kemampuan sumber informasi tentang subjek informasi.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dalam hal ini pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon selaku komunikator harus dapat memberikan rasa percaya kepada komunikan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan yang pertama mempunyai narasumber yang terpercaya dan membuat masyarakat menyukai isi materi sosialisasi tersebut.

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber dan hasil observasi lapangan, mayoritas narasumber mengetahui mengenai materi apa saja yang akan disampaikan dalam sosialisasi terutama tentang informasi pencegahan PMI non-prosedural. Kemudian, keempat narasumber menyatakan bahwasanya pihak Kantor Imigrasi telah mempersiapkan narasumber yang memang kompeten dalam bidangnya agar nantinya informasi yang disampaikan bisa akurat dan masyarakat pun tidak ada keraguan untuk menerima informasi tersebut karena telah tumbuh rasa percaya kepada narasumber. Namun masih kurangnya jumlah narasumber yang tersedia juga menjadi sedikit kendala apabila narasumber tersebut berhalangan hadir atau sosialisasi terjadi di dua tempat atau lebih secara bersamaan.

Bila melihat kesesuaian antara maksud dari 'Credibility' dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, pada dasarnya sudah cukup memahami unsur yang harus dipenuhi dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat. Namun, bila di lihat dari jumlah narasumber yang kompeten, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon masih kekurangan SDM untuk bisa memenuhi apa yang dimaksud dengan 'Credibility'.

b. Context (Konteks)

Selanjutnya, unsur yang harus diperhatikan dalam membuat keberhasilan dalam proses komunikasi sebagaimana yang terdapat dalam buku Cutlip (2006) adalah Context (Konteks). Dalam hal ini komunikator harus dapat peka terhadap kenyataan lingkungan.

Menurut keterangannya, dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon selaku komunikator harus bisa memberikan penjelasan dan kemudahan kepada masyarakat. Rencana komunikasi harus sesuai dengan realitas lingkungan. Media massa hanya suplemen dari tindak tutur dalam kehidupan sehari-hari. Konteks harus disediakan untuk partisipasi dan umpan balik. Konteksnya harus menginformasikan, bukan menentang isi pesan. Komunikasi yang efektif membutuhkan lingkungan sosial yang mendukung, karena informasi yang disampaikan nantinya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di lingkungan tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber (informan), 4 narasumber dari Seksi Teknologi, Informasi dan Komunikasi Keimigrasian menyatakan bahwa pihak kantor imigrasi menggunakan bahasa Jawa, Sunda, dan Bahasa Indonesia dalam pesan yang disampaikan tergantung letak daerah dan kenyataan lingkungan masyarakatnya. Kemudian keempat narasumber menyatakan bahwasanya dalam penyampaian pesan menggunakan Bahasa yang singkat dan menyesuaikan dengan kenyataan lingkungan. Namun, kelima narasumber juga menyatakan bahwa sejauh ini pihak kantor imigrasi belum bisa sepenuhnya memberikan kemudahan kepada masyarakat (terutama masyarakat didaerah).

Bila melihat kesesuaian antara maksud dalam poin 'Context' dengan apa yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, pada dasarnya sudah cukup memenuhi jika di lihat dari menyesuaikan dengan kenyataan lingkungan dan penggunaan Bahasa dalam melakukan sosialisasi. Namun, bila di lihat dari memberikan kemudahan kepada masyarakat, cara penyampaian serta gimmick, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon masih kurang memenuhi apa yang dimaksud dalam poin 'context'.

c. Content (Isi)

Kemudian unsur berikutnya yang harus diperhatikan dalam membuat keberhasilan dalam proses komunikasi sebagaimana yang terdapat dalam buku Cutlip (2006) adalah content. Dalam hal ini pesan yang disampaikan harus berisi arti untuk para penerimanya (masyarakat) dan harus sesuai dengan

kondisi penerima. Menurut cara pelaksanaannya, akan lebih melibatkan frekuensi penyampaian pesan. Kemudian menurut isinya akan cenderung melihat kepada urgency penyampaian pesan tersebut kepada komunikan (masyarakat).

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dalam hal ini pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon selaku komunikator harus dapat menentukan frekuensi pesan tersebut disampaikan kepada komunikan (masyarakat). Tidak hanya itu, pihak kantor imigrasi juga harus dapat menyesuaikan metode penyampaian pesan yang dikaitkan dengan urgency dari pesan tersebut, baik hanya sekedar memberikan informasi, mengajak, atau bahkan bersifat memaksa.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber (informan), keempat narasumber menyatakan bahwasanya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon melakukan sosialisasi pencegahan PMI non-prosedural kepada masyarakat dengan memperhatikan isi dari apa yang akan disampaikan. Hal tersebut dilakukan dengan alasan agar masyarakat dapat dengan mudah menerima dan menangkap informasi yang ingin disampaikan.

Bila melihat kesesuaian antara maksud dalam poin 'content' dengan apa yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, pada dasarnya sudah sesuai jika di lihat dari isi materi yang diberikan, yaitu dengan memberikan materi menggunakan bahasa Inonesia yang sederhana yang mudah diterima, , dimengerti dan dipahami oleh masyarakat.

#### d. Clarity (Kejelasan)

Kemudian unsur berikutnya yang harus diperhatikan dalam membuat keberhasilan dalam proses komunikasi sebagaimana yang terdapat dalam buku Cutlip (2006) adalah clarity. Hal ini mengingat pesan yang harus diberikan dalam istilah sederhana. Dalam menyampaikan sosialisasi harus menggunakan Bahasa atau kata-kata yang sederhana sehingga mudah dimengerti dan membuat masyarakat tertarik. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber (informan), keempat narasumber menyatakan bahwa pihak kantor menggunakan istilah yang sederhana dan juga menggunakan Bahasa dan kata-kata yang sederhana

sehingga mudah dimengerti dan membuat masyarakat tertarik. Dalam hal ini humas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon menyampaikan prosedur pembuatan paspor bagi para calon PMI secara runtut dan menggunakan istilah yang mudah dimengerti dengan menggunakan gambar dan grafik yang menarik. Tujuannya agar masyarakat tidak kebingungan untuk mengikuti prosedur yang ada.

#### e. Continuity and Consistency (Kontinuitas dan Konsistensi)

Kemudian unsur berikutnya yang harus diperhatikan dalam membuat keberhasilan dalam proses komunikasi sebagaimana yang terdapat dalam buku Cutlip (2006) adalah Continuity and Consistency. Dikatakan bahwa dalam memberikan informasi mengenai sosialisasi harus disampaikan secara berulang-ulang dan materi atau informasi yang disampaikan juga harus memiliki kejelasan agar tidak terjadinya perbedaan informasi yang diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dalam hal ini pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon selaku komunikator harus dapat memberikan informasi yang sesuai dengan aturan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan, serta sosialisasi yang dilakukan harus berulang-ulang agar masyarakat menjadi lebih paham terhadap informasi yang akan disampaikan. Sehingga sosialisasi yang dilakukan oleh humas kantor imigrasi tidak hanya sekedar memberikan informasi akan tetapi memberikan pemahaman dan pelajaran kepada masyarakat tentang dampak menjadi PMI non-prosedural.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber (informan) serta hasil observasi lapangan, keempat narasumber menyatakan bahwa informasi yang disampaikan sudah sesuai dengan aturan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan, dan untuk jumlah sosialisasi yang dilakukan pihak kantor imigrasi selalu mengusahakan untuk melakukan sosialisasi sebanyak mungkin akan tetapi kembali melihat keadaan dan jumlah SDM yang tersedia.

Bila melihat kesesuaian antara maksud dari 'Continuity and Consistency' dengan apa yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon,

pada dasarnya sudah cukup memahami unsur yang harus dipenuhi dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat. Namun, bila di lihat dari banyaknya sosialisasi yang dilakukan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon masih belum mencapai jumlah yang maksimal karena kekurangan SDM tidak sebanding dengan luasnya wilayah kerja.

f. Channel (Saluran)

Kemudian unsur berikutnya yang harus diperhatikan dalam membuat keberhasilan dalam proses komunikasi sebagaimana yang terdapat dalam buku Cutlip (2006) adalah Channel. Dikatakan bahwa dalam memberikan informasi mengenai sosialisasi harus dibutuhkan pemilihan saluran yang sesuai dengan publik sasaran. Hal ini mengingat media yang kurang tepat, ataupun penggunaan media yang sempit akan memengaruhi arus pesan yang terkirim kepada komunikan (masyarakat). Ada berbagai media yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan kepada komunikan, mulai dari media elektronik, media cetak, hingga media massa. Semakin luas dan beragamnya media, tentu akan mempengaruhi keberhasilan penyampaian pesan kepada komunikan. Untuk itu, maka dalam hal ini pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon selaku komunikator harus dapat menggunakan dan memanfaatkan berbagai macam media yang tersedia guna mengoptimalkan sosialisasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber (informan) serta hasil observasi lapangan, 2 narasumber menyatakan bahwa pihak kantor menggunakan media sosial dan media cetak (termasuk media massa) dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kemudian 2 narasumber lainnya turut menambahkan kegiatan sosialisasi dalam menyebarkan informasi mengenai pencegahan PMI non-prosedural yang juga turut mengundang pers dalam kegiatan tersebut. Adapun apa yang disampaikan sesuai dengan hasil observasi. Dengan demikian, kesesuaian antara maksud dalam poin 'Channel' dengan apa yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, pada dasarnya sudah sesuai jika di lihat dari pemilihan dan penggunaan media dalam menyebarkan informasi mengenai pencegahan PMI non-prosedural kepada masyarakat.

g. Capability of the audience (Kapasitas audiens)

Unsur terakhir yang harus diperhatikan dalam membuat keberhasilan dalam proses komunikasi sebagaimana yang terdapat dalam buku Cutlip (2006) adalah Capability of the audience (Kapasitas audiens). Dikatakan bahwa dalam memberikan sosialisasi harus disampaikan dengan melihat atau menyesuaikan dengan kapasitas audiens yang menerimanya. Ini dilakukan agar informasi yang ingin disampaikan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dalam hal ini pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon selaku komunikator harus dapat menyesuaikan isi materi, penggunaan Bahasa dan narasumber yang benar-benar bisa menyesuaikan dengan keadaan audiens.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber (informan) serta hasil observasi lapangan, mayoritas narasumber menyadari bahwa pada saat proses sosialisasi harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang akan menerima sosialisasi. Materi yang disampaikan harus mudah dipahami, dan Bahasa yang digunakan bisa menyesuaikan dengan bahasa yang sering digunakan masyarakat sehari-hari.

Bila melihat kesesuaian antara maksud dari 'Capability of the audience' dengan apa yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, pada dasarnya sudah cukup memahami unsur yang harus dipenuhi dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat.

**B. Kendala dalam rangka Mensosialisasikan Pencegahan PMI Non-Prosedural**

Dalam kaitannya dengan sosialisasi pencegahan PMI non-prosedural kepada masyarakat yang dilakukan oleh humas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, tentu juga mengalami kendala dalam praktiknya, sehingga pesan/informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak dapat tersampaikan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 4 (empat) orang narasumber pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber di atas, keempat

narasumber menyampaikan pendapat yang saling mengisi satu sama lain. Kendala terkait penyebaran informasi yang disampaikan oleh narasumber satu dan yang lainnya pada dasarnya serupa dan beririsan satu sama lain. Dengan demikian, kesimpulan mengenai kendala yang dihadapi dalam sosialisasi pencegahan PMI non-prosedural kepada masyarakat terbagi menjadi 4 (empat) poin, yaitu, SDM yang tidak memiliki latar belakang kehumasan, luasnya wilayah kerja, rendahnya kesadaran masyarakat, serta yang terakhir adalah kurangnya membangun relasi dengan instansi lain yang dapat dijadikan narasumber dalam menyebarkan informasi.

### KESIMPULAN

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia untuk mendorong Kantor Imigrasi dalam rangka memaksimalkan fungsi humas pemerintah dalam mendukung program Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu pencegahan PMI non-prosedural dengan membuat strategi komunikasi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Berdasarkan data, fakta dan informasi yang tersedia, pelaksanaan humas pemerintah pada Kantor Imigrasi Kelas I Cirebon telah mampu berperan untuk mencegah dan mengurangi jumlah PMI non-prosedural melalui strategi komunikasi berupa penyebaran informasi melalui kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi melalui media online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi humas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon dalam mensosialisasikan pencegahan PMI non-prosedural, adalah sebagai berikut:

1. Strategi Komunikasi humas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon dalam mensosialisasikan pencegahan PMI non-prosedural dengan melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan menyebarkan informasi melalui media-media lain seperti online dan sosial sudah sesuai dengan kondisi masyarakat yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon. Strategi komunikasi tersebut sudah efektif jika dilihat dari 7 (tujuh) indikator yang akan mempengaruhi keberhasilan dalam proses komunikasi. Indikator-

indikator tersebut adalah program public relations melalui unsur 7c pada proses komunikasi terdiri dari Credibility (Kredibilitas), Context (Konteks), Content (Isi), Clarity (Kejelasan), Continuity and Consistency (Kontinuitas dan Konsistensi), Channel (Saluran), Capability of the audience (Kapasitas atau kemampuan audiens).

2. Namun ada kendala yang dihadapi dalam mensosialisasikan pencegahan PMI non-prosedural kepada masyarakat, kendala tersebut terbagi menjadi 4 (empat) poin, yaitu, kurangnya SDM dan tidak memiliki latar belakang kehumasan, luasnya wilayah kerja, rendahnya kesadaran masyarakat, serta yang terakhir adalah kurangnya membangun relasi dengan instansi lain yang dapat dijadikan mediator dalam menyebarkan informasi. Kendala-kendala tersebut merupakan faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah PMI non-prosedural di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.

### SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan di atas, penulis ingin memberikan saran, yaitu:

1. Menambah jumlah dan kompetensi teknis kehumasan pemerintah kepada pegawai yang berada pada Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.

2. Menentukan wilayah prioritas yang menjadi lumbung PMI untuk dilakukannya sosialisasi. Sehingga sosialisasi yang dilakukan oleh humas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon dapat dilakukan secara maksimal.

3. Meningkatkan keberlanjutan pelaksanaan sosialisasi pencegahan PMI non-prosedural, ini bertujuan agar tingkat kesadaran masyarakat lebih tinggi dalam memahami dampak dari menjadi PMI yang tidak sesuai dengan prosedur.

4. Melakukan kerja sama dengan instansi dan pihak-pihak relevan yang terkait untuk melakukan sosialisasi pencegahan PMI non-prosedural kepada masyarakat di daerah.

5. Penelitian yang dapat dilakukan sebagai kelanjutan dari penelitian ini adalah bagaimana cara humas agar tidak hanya memastikan informasi tersebut diterima oleh masyarakat akan tetapi

diterapkan dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Politeknik Imigrasi, Jakarta, Indonesia sebagai institusi asal tim penulis yang telah memberikan dukungan kepada tim penulis melaksanakan implementasi Dharma Perguruan Tinggi penelitian untuk berkarya sebagai akademisi di Indonesia. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan ruang bagi kami untuk melakukan diseminasi ilmu pengetahuan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Cangara, H. (2002a). Pengantar Ilmu Komunikasi. PT Raja Grafindo Persada.
- Cangara, H. (2002b). Pengantar Ilmu Komunikasi (Cetakan Keempat). PT Rajagrafindo Persada.
- Cutlip, Scott M., Allen H. Center, dan Glen M. Broom. (2005). *Effective Public Relations*, (8th Edition). Kencana: Prenada Media Group.
- Emzir. (2017). Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif & kualitatif.
- Fajar, M. (2009). Ilmu Komunikasi: Teori & Praktik. Graha Ilmu.
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 tentang Kode Etik Hubungan Masyarakat Pemerintahan
- Kurniasih, N. (2013). Penggunaan Media Sosial bagi Humas di Lembaga Pemerintah. Forum Kehumasan Kota Tangerang.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Peri/12/M.Pan/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 19 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi
- Mar'at. (1984). Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya. Ghalia Indonesia
- McQuail, D. (2018). Teori Komunikasi Massa. Salemba Humanika.
- Mulyana, D. (2018). Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. PT Remaja Rosdakarya.
- Perbawasari, Susie, Diah Fatma Sjoraida, Vidia Ayu Lestari. (2016). Proses Public Relations Dalam Program Gerakan Pungut Sampah Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Penelitian Komunikasi* Vol. 19 No. 2, Desember 2016: 95–108. Sumedang: Universitas Padjadjaran.
- Rakhmat Jalaluddin. (2008). Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Statistik (cetakan ke delapan). PT Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat Jalaluddin. (2008). Psikologi Komunikasi. PT Remaja Rosdakarya
- Romli, M. S. (2017). Komunikasi Massa. Gramedia Widiasarana.
- Ruslan, R. (2018). Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi. In Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian.
- Suprawoto. (2018). *Government Public Relations: Perkembangan dan Praktik di Indonesia*. Prenada Media.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor.IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI Non-Prosedural
- Suryanto. (2015). Pengantar Ilmu Komunikasi. Cv Pustaka Setia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- West, R. (2009). *Introducing Communication Theory: Analysis and Application*. Mc Graw Hill Education.